

2012

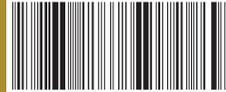
# Keseimbangan Pembangunan Aceh



Keseimbangan Pembangunan Aceh

PUSAT KAJIAN DAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (PKP2A IV LAN-ACEH)  
Jalan T. P. Nyak Makam No. 12, Lampineung, Banda Aceh 23125  
Telp. (0651) 7552569 - Fax. (0651) 7552568

ISBN 978-602-99581-4-0



PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
(PKP2A IV LAN - ACEH)

## **KAJIAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN ACEH**

### **Pengarah**

Drs. Dermawan, MM

### **Penanggung Jawab**

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

### **Tim Peneliti dan Penulis**

Edy Saputra, SH  
Ervina Yunita, S.Si  
Rati Sumanti, S.Sos

### **Sekretariat**

Heru Syahputra, SE  
Henri Sinurat, S.Ip  
Hilma Yuniasti, S.Hi  
Dodi Reza Pahlevi, S.Sos

Lembaga Administrasi Negara.

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV.

Kajian Keseimbangan Pembangunan Aceh/

Tim Penyusun, Edy Saputra ... [et al.];

Editor, Edy Saputra.

—Banda Aceh: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan  
Aparatur IV LAN, 2011.

33 + *xii* hlm ; 21 cm

ISBN 978-602-99581-4-0

1. Administrasi negara - Kajian  
I. Judul. II. Edy Saputra.  
III. Edy Saputra.

Diterbitkan oleh:

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV  
Lembaga Administrasi Negara (PKP2A IV-LAN Aceh)

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA

Jalan T.P. Nyak Makam No.12 Lampineung Banda Aceh 23125  
Telp. 0651-7552569 – fax. 0651 – 7552568

Banda Aceh 2012

## KATA PENGANTAR

Kesenjangan pembangunan antar daerah dialami oleh sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Aceh. Kesenjangan pembangunan di Aceh, ditandai dengan belum optimalnya hasil-hasil pembangunan kepada peningkatan kesejahteraan penduduk. Indikasi ketimpangan pembangunan antar daerah di Aceh terlihat dari perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaetn/kota di Aceh, perbedaan pendapatan perkapita antar kabupaten/kota, perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Aceh.

Pada tingkat kemiskinan antar kabupaten menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi merupakan daerah yang berada di kabupaten-kabupaten yang lebih terpencil, sementara wilayah-wilayah sekitar Kota Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan paling rendah.

Selanjutnya pada indikator pengangguran terbuka, tingkat pengangguran yang tinggi terjadi pada wilayah Aceh bagian utara dan timur yaitu kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, sedangkan pengangguran terendah berada pada sebagian wilayah Aceh bagian tengah yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Aceh Tengah, serta sebagian di wilayah barat yaitu Kabupaten Nagan Raya.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keseimbangan pembangunan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pembangunan di Provinsi Aceh. Adapun manfaat penelitian ini secara umum

diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan publik dan secara khusus dapat bermanfaat bagi Pemerintah Aceh sebagai bahan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun pola pembangunan Aceh ke depan secara merata, seimbang dan terintegrasi.

Banda Aceh, Desember 2012  
Kepala PKP2A IV LAN

**Drs. Dermawan, MM**

## Executive Summary

Kebijakan otonomi memberikan peluang bagi daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengaktualisasi kewenangan dan kemandiriannya dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah untuk kesejahteraan penduduknya, namun demikian adanya pemaknaan dan penerapan konsep otonomi daerah sebagai sebuah kebebasan dan kewenangan yang luas bagi daerah dalam mengeksploitasi potensi-potensi daerahnya, telah menciptakan kesenjangan pembangunan antar daerah, kecenderungannya adalah bagi daerah yang kaya dan memiliki struktur yang lebih seimbang biasanya akan melaju lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang miskin potensi, walaupun itu belum menjadi sebuah jaminan.

Daerah Aceh memiliki sumber daya alam dan finansial untuk dikelola secara lebih baik, merata dan berkeadilan. Namun ketersediaan potensi yang cukup memadai tersebut belum mampu menciptakan keseimbangan pembangunan untuk daerah kabupaten dan kota di Aceh. Ketidakseimbangan pembangunan terindikasi dari ketimpangan pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Aceh, selama periode 2005-2010 terus mengalami peningkatan walaupun menurun pada tahun 2010.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai *indeks Williamson*, ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,41, kemudian menurun pada tahun 2010 yaitu 0,40. Walaupun ketimpangan tersebut masih dalam katagori rendah, namun

kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh terus memburuk mengingat nilai ketimpangan setiap tahunnya terus meningkat (kecuali tahun 2010). Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan kemampuan ekonomi antar kabupaten/kota yang diukur dari nilai PDRB dan pertumbuhan penduduk. Perbedaan potensi ekonomi, kebijakan pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana serta investasi menimbulkan perbedaan besaran PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita kabupaten dan kota di Aceh dari 2005 hingga 2010 yang tertinggi adalah Kota Banda Aceh sebesar 13,71 persen setiap tahunnya. Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata-rata hanya tumbuh sebesar -2,68 persen setiap tahunnya. Perkembangan PDRB yang berbeda di setiap kabupaten/kota di Provinsi menyebabkan munculnya perbedaan pola dan struktur ekonomi. Berdasarkan uji *Tipologi Klassen*, terdapat beberapa kabupaten masuk ke dalam: **(i)** daerah maju dan cepat tumbuh (7 daerah) yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Besar, Biruen, Kota Banda Aceh, Sabang dan Lhokseumawe. Pendapatan perkapita melalui nilai PDRB daerah ini di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya, demikian juga kondisi ekonomi semakin baik baik karena pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut lebih tinggi dari rata-rata dari kabupaten/kota lainnya di Aceh; **(ii)** daerah berkembang cepat, yaitu Kabupaten Simeulu, Aceh Tenggara, Pidie Jaya,

Gayo Lues dan Kota Subulussalam. Daerah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Aceh akan tetapi pendapatan perkapita lebih rendah dari pendapatan perkapita rata-rata kabupaten/kota; **(iii)** daerah maju tapi tertekan, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat dan Nagan Raya. Daerah ini memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota, akan tetapi pertumbuhannya rendah. PDRB yang tinggi tanpa dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan ekonomi berjalan lambat yang pada akhirnya menurunkan kinerja ekonomi di daerah tersebut; dan **(iv)** daerah relatif tertinggal (8 daerah), yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Timur, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan Kota Langsa. Daerah ini memiliki pendapatan perkapita yang lebih rendah dari daerah lainnya dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari daerah lainnya.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB menyebabkan nilai PDRB per kapita menurun. Peningkatan penduduk di beberapa kabupaten/kota di Aceh menyebabkan permasalahan baru yaitu kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang tidak mampu dibarengi dengan peningkatan ekonomi daerah sehingga jaminan hidup dengan kondisi ekonomi yang layak tidak dapat terpenuhi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pendapatan perkapita yang rendah menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di beberapa

kabupaten/kota di Aceh. Tingkat kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota masih berada diatas presentase Provinsi Aceh (28,69 persen di tahun 2005, 28,28 persen di tahun 2006, 26,65 persen di tahun 2007, 23,55 persen di tahun 2008 dan 21,61 persen di tahun 2009), terkecuali pada kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan yang memiliki presentase penduduk miskin lebih kecil. Sedangkan masih ada 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh yang berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Aceh. Dalam menangani permasalahan kemiskinan penduduk, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitik-beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya agar dapat berkinerja dan berdayaguna. Persentase penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota di provinsi Aceh berbeda selama periode 2005-2010. Sebanyak 15 kabupetan/kota mengalami penurunan persentase hampir setiap tahunnya, selebihnya di 9 Kab/Kota berfluktuatif (naik-turun) antara 1-2 kali.

Selama periode periode 2005–2010, kenaikan persentase penduduk miskin sebanyak 2 kali dialami oleh kota Banda Aceh (di 2006 dan 2008) dan Kota Langsa (2007 dan 2008), hal tersebut, dikarenakan adanya kecenderungan urbanisasi penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan pada saat di survey.

Ketidakseimbangan pembangunan di Aceh juga disebabkan oleh (i) adanya perbedaan realisasi investasi

yang rendah di sejumlah kabupaten, disertai dengan kecendrungan investasi terkonsentrasi pada daerah yang telah berkembang di perkotaan seperti di Banda Aceh karena kepastian jaminan pemasaran; (ii) perbedaan kebijakan pemerintah dalam pengeluaran pembiayaan untuk pengembangan sektor ekonomi yang kurang sesuai dengan kemampuan dan potensi sumber daya ekonomi daerah belum mampu memberikan dorongan bagi produksi daerah. Sebagai contoh, daerah yang memiliki potensi pertanian harus lebih memfokuskan pengeluaran untuk sektor pertanian pertanian, khususnya untuk belanja modal dan subsidi pertanian; (iii) migrasi dan konsentrasi tenaga kerja produktif yang memiliki skill/terdidik ke daerah yang lebih berkembang seperti ke Banda Aceh menjadikan Banda Aceh memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang lebih mampu mengelola sumber daya yang ada untuk menjalankan perekonomian. Kondisi ini menyebabkan produksi ekonomi Kota Banda Aceh tinggi dan cenderung meningkat tajam. Kondisi inilah yang membuat Kota Banda Aceh masuk dalam kategori maju dan cepat tumbuh dalam pengujian Klassen.

Kondisi ketimpangan pembangunan yang dihadapi kabupaten/kota di Provinsi Aceh berpotensi permasalahan dalam jangka panjang. Ketimpangan pembangunan yang relatif terus terjadi akan menimbulkan kecemburuan antar daerah karena rendahnya tingkat pemerataan pembangunan, sedangkan disatu sisi Aceh adalah daerah yang mempunyai sumber pembiayaan finansial otonomi

husus yang memadai, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat dikawatirkan menimbulkan keinginan pemekaran daerah-daerah provinsi dalam jangka panjang.

Kajian ini menghasilkan rekomendasi yaitu dalam rangka upaya peningkatan nilai PDRB daerah kabupaten dan kota di Aceh, (i) Pemerintah kabupaten/kota diharapkan memetakan lebih lanjut sektor keunggulan daerah, kemudian perlu dikonsentrasikan dan fokus pengembangan melalui kebijakan dan pengeluaran daerah untuk sektor unggulan yang telah ditetapkan. Diketahui bahwa sebagian besar kabupaten/kota memiliki potensi sektor pertanian, maka bagi daerah dengan potensi SDA ini, pembiayaan dan pengeluaran lebih di dorong dan relevan untuk menunjang kepada pembangunan ekonomi di sektor pertanian, begitu juga sebaliknya dengan daerah-daerah yang memiliki perbedaan potensi unggulan ekonomi; (ii) Pemerintah kabupaten dan kota menetapkan kerjasama untuk saling mengintegrasikan program-program pembangunan ekonomi antar daerah, terutama daerah-daerah yang mempunyai fungsi kawasan yang sama; (iii) Pemerintah daerah kabupaten dan kota perlu menjalin kemitraan dengan dunia usaha menarik dan meningkatkan investasi di sektor pertanian; dan (iv) perlu menciptakan pemerataan lapangan kerja di daerah-daerah kabupaten dan kota yang kurang berkembang, hal ini untuk menghindari konsentrasi tenaga kerja yang terdidik (mempunyai skill) di satu daerah yang maju saja (edy saputra).

## DAFTAR ISI BUKU

Kata Pengantar .....	ii
Executive Summary .....	iv
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN:	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian .....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pembangunan Daerah.....	8
2.2. Keseimbangan Pembangunan.....	10
2.3. Produk Domestik Regional Bruto.....	16
BAB III METODE KAJIAN	
3.1. Tipe dan Ruang Lingkup Kajian .....	19
3.2. Jenis Data dan Sumber Data .....	19
3.3. Metode Analisis Data .....	20
BAB IV ANALISIS KESIMBANGAN PEMBANGUNAN	
4.1. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh .....	22
4.2. Penduduk dan Kemiskinan di Provinsi Aceh .....	31

4.3. Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh .....	38
4.4. Upaya Mengurangi Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh .....	42

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan .....	49
5.2. Saran .....	50

DAFTAR PUSTAKA .....	53
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel1. PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010 .....	3
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2005-2010 .....	5
Tabel 3. PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh .....	23
Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Periode Tahun 2005-2010 Provinsi Aceh .....	25
Tabel 5. Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Aceh .....	33
Tabel 6. Presentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh .....	36
Tabel 7. Indeks Ketimpangan Pembangunan Daerah Aceh 2005 - 2010 .....	40

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Hasil Analisis Klasen .....	28
Gambar 2. Klasifikasi laju pertumbuhan ekonomi Kab/Kota Aceh.....	29
Gambar 3. Pembentuk PDRB Aceh Singkil.....	44
Gambar 4. Pembentuk PDRB Kota Banda Aceh..	46
Gambar 5. Pembentuk PDRB Pidie Jaya 2010.....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan peluang dan tantangan positif bagi setiap daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki di daerah secara optimal. Dengan lingkup kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, daerah secara mandiri dan otonom dapat menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah dan publik di daerah untuk kesejahteraan penduduknya. Meskipun pada sisi yang lain, otonomi daerah terkadang menjadi kondisi yang kurang mengembirakan bagi sejumlah daerah yang terbatas ketersediaan sumber daya daerahnya.

Adanya pemaknaan otonomi daerah sebagai sebuah kewenangan yang luas oleh daerah, terutama dalam hal mengeksploistasi potensi-potensi sumber-sumber daya alamnya, secara tidak langsung telah menciptakan kesenjangan pembangunan antar daerah, bagi daerah yang kaya dan memiliki struktur yang lebih seimbang cenderung akan melaju lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang miskin potensi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah tersebut dialami oleh sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Aceh. Kesenjangan pembangunan di Aceh antara lain terlihat dari ketimpangan pendapatan perkapita antar kabupaten/kota, perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Aceh, dan tingkat kemiskinan antar kabupaetn/kota di Aceh.

Jika dilihat pada pendapatan domestik regional bruto (PDRB) antar kabupaten/kota misalnya di tahun 2010 terjadi ketimpangan PDRB antar kabupaten/kota di provinsi Aceh. Jika dibandingkan dengan rata-rata PDRB yang mencapai Rp 1.225.734,19 juta, bahkan terdapat banyak kabupaten/kota yang memiliki nilai PDRB di bawah rata-rata. Sebagai contoh, Kota Sabang yang hanya memiliki PDRB sebesar Rp 248.000,00 juta. Nilai tersebut sangat kecil jika dibandingkan PDRB Kota Banda Aceh yang mencapai Rp 3.056.186,08 juta di tahun 2010. Ketimpangan PDRB ini berlanjut terhadap ketimpangan pendapatan perkapita. Kota Banda Aceh memiliki pendapatan perkapita yang jauh di atas rata-rata yaitu mencapai Rp 13,68 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan pembangunan di Provinsi Aceh.

Perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat diperhatikan pada Tabel 1

**Tabel 1**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2010**

No	Kabupaten/Kota	PDRB (Rp juta)	PDRB per Kapita (Rp juta)
1.	Kab. Simeulue	255.000,00	3,16
2.	Kab. Aceh Singkil	484.576,48	4,73
3.	Kota Subulussalam	261.224,69	3,87
4.	Kab. Aceh Selatan	1.301.826,13	6,44
5.	Kab. Aceh Tenggara	766.933,22	4,28
6.	Kab. Aceh Timur	1.634.855,94	4,54
7.	Kab. Aceh Tengah	1.187.238,98	6,76
8.	Kab. Bener Meriah	750.000,00	6,13
9.	Kab. Aceh Barat	1.265.376,75	7,29
10.	Kab. Aceh Besar	2.520.171,60	7,17
11.	Kab. Pidie	1.709.031,35	4,51
12.	Kab. Pidie Jaya	652.000,00	4,90
13.	Kab. Bireuen	2.654.641,64	6,82
14.	Kab. Aceh Utara	2.852.000,00	5,38
15.	Kab. ABDYA	667.215,03	5,29
16.	Kab. Gayo Lues	431.145,60	5,42
17.	Kab. Aceh Tamiang	1.161.000,00	4,61
18.	Kab. Nagan Raya	967.860,72	6,93
19.	Kab. Aceh Jaya	276.000,00	3,59
20.	Kota Banda Aceh	3.056.186,08	13,68
21.	Kota Sabang	248.000,00	8,09
22.	Kota Langsa	885.220,60	5,94
23.	Kota Lhokseumawe	2.204.381,53	12,88
Rata-rata		1.225.734,19	6,19

Sumber: BPS, 2012

Untuk tingkat kemiskinan antar kabupaten menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi merupakan daerah yang berada di kabupaten-kabupaten yang lebih terpencil, sementara wilayah-wilayah sekitar Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan paling rendah (Bank Dunia.2008).

Persentase penduduk miskin di Aceh masih tergolong tinggi pada tahun 2009 sebesar 21,80%, 2010 menjadi 20,98 %, 2011 sebesar 19,57 % dan pada September 2012 sudah semakin mengecil menjadi 18,58 %, namun tetap masih melebihi angka rata-rata Nasional (14,20%) bahkan pada tahun 2009 tingkat kemiskinan Aceh berada pada urutan ke tujuh tertinggi di Indonesia.

Lebih lanjut persentase penduduk miskin di Aceh dapat diperhatikan pada tabel 2.

## Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2010

Kode	Kabupaten/ Kota	Jumlah (000)						Persentase (%)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Simeulue	27,1	26,9	25,1	20,57	19,11	18,90	34,09	33,80	32,26	26,45	24,72	23,63
02	Aceh Singkil	44,0	43,3	26,5	22,24	20,29	19,90	29,20	28,41	28,54	23,27	21,06	19,39
03	Aceh Selatan	52,4	47,5	49,8	38,82	35,41	32,20	26,98	24,58	24,72	19,40	17,50	15,93
04	Aceh Tenggara	42,5	40,3	36,3	30,89	27,87	30,00	24,63	23,56	21,60	18,51	16,77	16,79
05	Aceh Timur	92,8	92,2	84,9	76,22	68,30	66,50	30,02	29,85	28,15	24,05	21,33	18,43
06	Aceh Tengah	45,0	43,6	39,9	40,64	38,17	35,30	27,68	26,68	24,41	23,36	21,43	20,10
07	Aceh Barat	54,4	52,5	48,2	43,69	40,39	42,40	35,50	34,54	32,63	29,96	27,09	24,43
08	Aceh Besar	88,5	86,3	79,1	63,46	58,97	66,20	29,40	28,66	26,69	21,52	20,09	18,80
09	Piöe	173,9	168,6	120,3	101,77	93,80	90,20	36,01	35,32	33,31	28,11	25,87	23,80
10	Bireuen	106,3	102,9	93,0	79,09	72,94	76,10	29,70	29,05	27,18	23,27	21,65	19,51
11	Aceh Utara	180,4	174,5	163,2	135,70	126,59	124,40	35,87	34,98	33,16	27,56	25,29	23,43
12	Aceh Barat Daya	33,5	33,0	33,5	27,43	25,00	25,20	28,29	28,30	28,63	23,42	21,33	19,94
13	Gayo Lues	24,8	24,5	23,1	18,89	17,09	19,00	33,97	33,51	32,31	26,57	24,22	23,91
14	Aceh Tamiang	58,7	56,7	50,8	50,82	45,29	45,20	24,50	23,89	22,19	22,29	19,96	17,99
15	Nagan Raya	45,8	43,7	40,0	33,21	30,86	33,40	36,18	35,25	33,61	28,11	26,22	24,07
16	Aceh Jaya	19,1	18,6	19,5	17,24	17,13	15,60	31,28	30,42	29,28	23,86	21,86	20,18
17	Bener Meriah	31,4	30,2	28,1	31,28	28,58	32,10	28,76	27,98	26,55	29,21	26,58	26,23
18	Piöe Jaya			43,3	37,70	35,60	34,70			35,00	30,26	27,97	26,08
71	Banda Aceh	15,1	14,7	14,0	19,91	17,27	20,80	8,37	8,25	6,61	9,56	8,64	9,19
72	Sabang	8,8	8,3	7,8	7,14	6,54	6,60	29,78	28,56	27,13	25,72	23,89	21,69
73	Langsa	21,0	19,4	19,1	23,96	21,34	22,40	14,98	13,95	14,25	17,97	16,20	15,01
74	Lhoksumawe	25,6	22,2	19,4	23,94	22,53	24,00	15,90	14,25	12,75	15,87	15,08	14,07
75	Subulussalam			18,7	17,73	16,75	16,40			30,16	28,99	26,80	24,36
11	Provinsi	1166,38	1149,70	1083,70	959,70	892,86	861,85	28,69	28,28	26,65	23,53	21,80	20,98

15

Penduduk miskin umumnya berada di daerah perdesaan pada 17 Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini diakibatkan konsentrasi perekonomian melalui aktifitas usaha dan/atau pasar masih didominasi oleh wilayah perkotaan.

Dari beberapa indikator diatas ditemukan bahwa perkembangan pembangunan antar daerah kabupaten/kota di Aceh belum terjadi secara merata. Atas dasar tersebut dilakukan pengkajian guna menganalisis kesenjangan pembangunan Aceh.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Aceh ?
2. Bagaimanakah tingkat keseimbangan pembangunan antar daerah di Aceh ?

### 1.3. Tujuan Dan Manfaat Kajian

Kajian Keseimbangan Pembangunan Aceh bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Aceh
2. Menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan kabupaten dan kota di Aceh.
3. Merumuskan saran kebijakan pembangunan Aceh

Adapun mamfaat penelitian ini secara umum adalah diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan publik. Secara khusus diharapkan dapat bermanfaat bagi;

1. Pemerintah Aceh; sebagai bahan ilmiah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun pola pembangunan Aceh ke depan secara merata, seimbang dan terintegrasi.
2. Pemerintah Kab/Kota; diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyempurnakan penyelenggaraan pembangunan yang saling terintergrasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1. Pembangunan Daerah

Pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. "*Development is not a static concept. It is continuously changing*". Artinya juga bisa dikatakan bahwa pembangunan itu sebagai "*never ending goal*". (Rahmaddin MY.2009). Dinamikan pembangunan baik yang berlangsung dalam skala nasional dan daerah, senantiasa mengalami capaian perkembangan yang berbeda.

Dalam konteks pembangunan di daerah, menurut Lincolin Arsyad (1997) Pembangunan di daerah diartikan sebagai sebuah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk merangsang perkembangan ekonomi di wilayah. Menurut Arsyad (1997) keadaan sosial ekonomi yang berbeda disetiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan

tingkat pembangunan antar daerah akan mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah.

Berkembang dan tidak berkembangnya pembangunan di suatu daerah sangat terkait dengan adanya pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi yang ada di suatu daerah. Bagi daerah yang mempunyai sumber daya yang memadai dan didukung dengan pengelolaan yang baik, serta pemusatan ekspansi ekonomi di daerah tersebut, sangat memungkinkan akan cepat lebih maju dengan daerah yang potensi ekonomi dan sumber daya alamnya kurang memadai.

Dalam pengembangan ekonomi (*economic development*), ada tiga parameter yang dapat dilihat untuk menilai kinerja pemerintah daerah, yakni : pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Artinya, mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi di daerah. Juga dilihat bagaimana upaya pemerintah daerah pemeratakan distribusi ekonomi hingga ke pelosok-pelosok. Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti di pusat kabupaten-kota saja. Terkait pemberdayaan ekonomi, berkaitan dengan program/kebijakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan

potensi dan menyiasati keterbatasan ekonomi lokal. Semakin terintegrasi upaya memacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi lokal, nilai daerah semakin tinggi.

Salah satu komponen yang penting diperhatikan dan diarahkan mempercepat pembangunan daerah adalah dengan mengembangkan Ekonomi Lokal. Pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*), yaitu dengan mengembangkan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah untuk meningkatkan derajat kemajuan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi ini yang diharapkan tepat dan mampu menemukan dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing (*knowledge based economy*) sekaligus berbasis sumberdaya lokal (*resource based economy*) baik melalui pemerintah daerah, sektor swasta dan kelembagaan/organisasi yang berbasis masyarakat setempat.

## **2.2. Keseimbangan Pembangunan**

Istilah pembangunan seimbang mulai populer pada zaman industrialisasi di eropa selatan dan tenggara (1953). Konsep pembangunan melalui industrialisasi secara besar-

besaran di daerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan daerah agar lebih cepat daripada di daerah yang lebih kaya (Rosenstein – Rodan.1953). Menurut mereka, pembangunan industri secara besar-besaran akan menciptakan 3 macam eksternalitas ekonomi yaitu: (i) yang diakibatkan oleh perluasan pasar, (ii) karena industri yang sama letaknya berdekatan, dan (iii) karena adanya industri lain dalam perokonomian tersebut.

Dalam konteks itu, pembangunan seimbang diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (simultaneous) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Namun demikian konsep pembangunan seimbang yang menepatkan upaya industrialisasi secara besar-besaran, disatu sisi telah melemahkan perkembangan pada sektor yang lain yaitu pertanian (Lewis), sehingga sektor pertanian akan menghadapi kesukaran untuk memenuhi pertambahan permintaan bahan pangan dan bahan baku pertanian yang akan digunakan sektor industri. Oleh karena itu teori pembangunan seimbang harus diperluas sehingga meliputi

juga usaha pembangunan secara besar-besaran di sektor pertanian. Dengan demikian kenaikan produktivitas dan produksi sektor pertanian akan dapat memenuhi kenaikan permintaan sektor industri. Lebih lanjut Lewis mengatakan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian, dalam hal ini dia mencontohkan hubungan dua sektor ekonomi yang saling terkait dalam menciptakan pembangunan yang seimbang yaitu dengan asumsi bahwa jika sektor industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan kerja, begitu juga sebaliknya jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian juga akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi, akhirnya jika sektor pertanian tidak berkembang maka sektor industri pun tidak akan berkembang, dan keuntungan sektor industri juga kecil. Pendapat senada tentang pertumbuhan ekonomi harus berlangsung secara serentak di semua sektor, yang berarti terjadi pembangunan berimbang antara industri manufaktur

dan pertanian di kemukakan oleh CP Kindleberger, dalam ML. Jhingan.(1993)

Dengan demikian dalam lingkup yang lebih luas Pembangunan seimbang dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan pembangunan di berbagai sektor. Singkatnya. teori pembangunan seimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama, dengan pertimbangan akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan dipusatkan pada satu sektor industri saja. Ketiadaan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidak stabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terlambat.

Pendapat yang berbeda dan konstruktif terhadap pembangunan seimbang adalah pembangunan tak seimbang yang diperkenalkan oleh Hirschman. Dasar analisis yang digunakan adalah tidak relevan bila pembangunan seimbang dan merata untuk semua sektor ekonomi, hal ini sangat terkait dengan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki daerah daerah adalah berbeda. Oleh karena itu konswekwensinya adalah harus ada skala prioritas sektor apa

yang harus didahulukan di kembangkan, yang disesuaikan dengan modal dan sumber daya yang tersedia dan signifikan dikelola. Dia memusatkan perhatiannya bahwa dalam pembangunan tak seimbang tersebut penting diarahkan kepada sektor prasarana dan sektor produktif, dimana dapat mendorong pengembangan proyek-proyek pembangunan yang lainnya di masa mendatang.

Kedua konsep teori di muka jika dianalisis lebih jauh, walaupun memiliki pendekatan yang berbeda, namun akan ditemukan bahwa intinya adalah penyelenggaraan pembangunan baik yang seimbang maupun tidak seimbang adalah mempunyai goal yang sama yaitu berupaya mengali dan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah-daerah tersebut, yang muara akhirnya adalah terjadinya kesejahteraan bagi rakyat di daerah-daerah tersebut.

Untuk menganalisis kesimbangan pembangunan, dapat dilakukan analisis terhadap Ketimpangan Ekonomi antar daerah. Ketimpangan tersebut diantaranya dalam hal ketidakmerataan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Dalam hal ini Thee Kian Wie (1982) menyatakan bahwa

ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi :

1. Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan (*size distribution oncome*);
2. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*);
3. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*);

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan daerah (Williamson,1956).

Ketimpangan pendapatan antar daerah, tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut, dimana terlihat pada nilai PDRB-nya. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima akan menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan tingkat

pemerataan pendapatan (ketimpangan pendapatan) daerah tersebut (Todaro.1981). Selanjutnya Todaro mengatakan ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara (baca. daerah) yang baru memulai pembangunan, dibandingkan dengan daerah-daerah maju.

Untuk menyikapi distribusi pendapatan yang tidak merata tersebut, diperkenalkan model pertumbuhan yaitu teori Harrod-Domar dan Neo Klasik, yang memberikan perhatian khusus kepada peran kapital yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah.

### **2.3. Produk Domestik Regional Bruto**

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dua kriteria kinerja ekonomi makro yang terkait dengan PDRB ialah laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor ekonomi. Untuk melihat pergeseran kontribusi sektor ekonomi dapat dilakukan dengan mengkaji PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dalam periode

waktu tertentu menggunakan analisis terhadap PDRB atas dasar harga konstan. Dalam upaya mengetahui perkembangan ekonomi makro secara dini dan berkesinambungan, maka kajian terhadap PDRB tersebut disusun dalam jangka triwulan pada tahun berjalan.

PDRB adalah merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan seluruh unit usaha, baik berupa barang maupun jasa, dalam suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada saat penghitungan (current price), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar (constant price). Tahun dasar yang ditetapkan dalam penghitungan PDRB saat ini adalah tahun 2000.

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan produksi yaitu menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit produksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha (sektor ekonomi) yaitu (1)

pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan/konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) jasa-jasa. Pada setiap sektor ekonomi tersebut selanjutnya dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

- b. Pendekatan pendapatan yaitu menghitung PDRB dengan menjumlahkan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah (1) upah dan gaji; (2) sewa tanah; (3) bunga modal dan keuntungan. Semua penghitungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.
- c. Pendekatan pengeluaran yaitu menghitung PDRB sebagai penjumlahan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba; (2) pengeluaran konsumsi pemerintah; (3) pembentukan modal tetap domestik bruto; (4) perubahan inventori; dan (5) ekspor neto (nilai ekspor dikurangi nilai impor).

## **BAB III**

### **METODE KAJIAN**

#### **3.1. Tipe dan Ruang Lingkup Kajian**

Jenis kajian keseimbangan pembangunan Aceh adalah diskriptif kualitatif yaitu kajian yang bertujuan menganalisis keseimbangan pembangunan daerah di Aceh dilihat dari aspek kesenjangan pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat persentase kemiskinan daerah. Ruang lingkup data untuk periode 5 tahun yaitu 2006–2010. Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

#### **3.2. Jenis Data Dan Sumber Data**

Jenis data kajian adalah: (1) Data Primer, dalam bentuk informasi lisan dan pernyataan dari narasumber; (2) Data Sekunder, dalam bentuk dokumen dari BPS, Bappeda, dsb; dan hasil-hasil penelitian ilmiah.

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui; (1) Wawancara, FGD; dan (2) telaahan literatur dan dokumen terkait.

#### **3.3. Metode Analisis Data**

Teknik Analisis Data meliputi:

- a. Untuk melihat aspek kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/kota di Aceh, digunakan teknis analisis indeks williamson, yaitu menganalisis seberapa besarnya kesenjangan pendapatan antar wilayah/daerah di Provinsi Aceh. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i/n}}{\bar{y}}$$

**Keterangan**

- $CV_w$  = Indeks Williamson  
 $f_i$  = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- $i$  (jiwa)  
 $n$  = Jumlah penduduk Aceh (jiwa)  
 $Y_i$  = PDRB per kapita kabupaten/kota ke- $i$  (Rupiah)  
 $\bar{y}$  = PDRB per kapita rata-rata Provinsi Aceh (Rupiah).

- b. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi akan dianalisis nilai laju pertumbuhan PDRB perkapita antar daerah di Aceh, dan klafikasi laju pertumbuhan ekonomi menggunakan teknik uji tipologi klassen.

**BAB IV**  
**KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN ACEH**

Keseimbangan pembangunan antar kabupaten / kota di Aceh, dianalisis dari pertumbuhan PDRB perkapita antar daerah di Aceh, laju pertumbuhan ekonomi hasil uji tipologi klassen, dan kesenjangan pendapatan hasil indeks willamson.

**4.1. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dua kriteria kinerja ekonomi makro yang terkait dengan PDRB ialah laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor ekonomi. Untuk melihat pergeseran kontribusi sektor ekonomi dapat dilakukan dengan mengkaji PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dalam periode waktu tertentu menggunakan analisis terhadap PDRB atas dasar harga konstan.

Perbedaan potensi ekonomi, kebijakan pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana serta investasi

menimbulkan perbedaan besaran PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Perkembangan PDRB dapat diperhatikan pada Tabel 3.

**Tabel. 3**  
**PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

No.	Kabupaten/ Kota	PDRB 2005	PDRB 2006	PDRB 2007	PDRB 2008	PDRB 2009	PDRB 2010
1	Simeulue	167	201	225	232	243	255
2	Aceh Singkil	659	402	421	441	462	485
3	Subulussalam	0	217	226	237	248	261
4	Aceh Selatan	1.092	1.130	1.161	1.203	1.249	1.302
5	Aceh Tenggara	407	612	655	692	728	767
6	Aceh Timur	1.381	1.425	1.491	1.529	1.576	1.635
7	Aceh Tengah	862	987	1.044	1.091	1.138	1.187
8	Bener Meriah	551	644	660	686	717	750
9	Aceh Barat	879	966	1.082	1.141	1.203	1.265
10	Aceh Besar	1.732	1.875	2.130	2.262	2.385	2.520
11	Pidie	1.577	1.462	1.502	1.570	1.637	1.709
12	Pidie Jaya	0	531	558	588	619	652
13	Bireuen	1.794	2.063	2.259	2.386	2.512	2.655
14	Aceh Utara	2.152	2.453	2.544	2.637	2.739	2.852
15	Aceh Barat Daya	529	556	582	608	635	667
16	Gayo Lues	287	359	582	391	410	431

No.	Kabupaten/ Kota	PDRB 2005	PDRB 2006	PDRB 2007	PDRB 2008	PDRB 2009	PDRB 2010
17	Aceh Tamiang	1.045	1.050	1.075	1.096	1.126	1.161
18	Nagan Raya	788	822	867	898	930	968
19	Aceh Jaya	212	236	243	253	264	276
20	Banda Aceh	1.504	2.172	2.585	2.731	2.886	3.056
21	Sabang	133	201	216	225	236	248
22	Langsa	717	750	781	811	845	885
23	Lhokseumawe	1.491	1.652	1.852	2.065	2.081	2.204

Sumber: BPS 2012

Nilai PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan harga konstan berbeda-beda. Pada tahun 2005, PDRB tertinggi diperoleh kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar Rp 2.152 milyar, sedangkan yang terendah diperoleh kota Sabang yaitu hanya sebesar Rp 133 milyar. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi dan kebijakan ekonomi daerah, beberapa daerah mengalami peningkatan ekonomi. Hal ini dilihat dari pertumbuhan nilai PDRB yang cukup signifikan. Tahun 2010, Kota Banda Aceh menjadi kabupaten/kota yang memiliki nilai PDRB tertinggi di Provinsi Aceh dengan besaran nilai PDRB sebesar Rp 3.056 milyar. Peningkatan

PDRB Kota Banda Aceh cukup signifikan. Peningkatan terus terjadi sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2010.

Nilai PDRB yang besar belum tentu menunjukkan laju perbaikan ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju PDRB setiap tahunnya. (tabel 4).

Tabel 4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Periode Tahun 2005-2010

Dilihat dari PDRB

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)						Rata-rata
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Simeulue	0,60	20,36	11,94	3,11	4,74	4,94	7,62
2.	Aceh Singkil	3,78	39,00	4,82	4,59	4,75	4,97	-2,68
3.	Aceh Selatan	6,05	3,42	2,73	3,63	3,81	4,27	3,99
4.	Aceh Tenggara	8,53	50,37	7,03	5,60	5,24	5,36	13,69
5.	Aceh Timur	4,86	3,19	4,63	2,56	3,09	3,71	3,67
6.	Aceh Tengah	10,37	14,45	5,82	4,55	4,27	4,32	7,30
7.	Bener Meriah	2,61	16,88	2,48	3,94	4,52	4,60	5,84
8.	Aceh Barat	-13,14	9,90	11,98	5,46	5,43	5,21	4,14
9.	Aceh Besar	1,58	8,26	13,61	6,21	5,42	5,68	6,79
10.	Pidie	3,07	-7,29	2,71	4,52	4,27	4,42	1,95

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)						Rata-rata
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
11.	Pidie Jaya	0,00	0,00	5,08	5,38	5,27	5,33	5,27
12.	Bireuen	2,51	14,99	9,49	5,63	5,27	5,69	7,27
13.	Aceh Utara	-5,41	13,99	3,71	3,66	3,87	4,13	3,99
14.	Aceh Barat Daya	2,72	5,10	4,68	4,47	4,44	5,07	4,41
15.	Gayo Lues	4,36	25,09	62,04	-32,75	4,77	5,19	11,45
16.	Aceh Tamiang	5,98	0,48	2,38	1,95	2,74	3,11	2,77
17.	Nagan Raya	-3,87	4,27	5,49	3,63	3,46	4,12	2,85
18.	Aceh Jaya	-33,96	11,32	2,97	4,12	4,35	4,55	-1,11
19.	Subulussalam	0,00	0,00	4,23	4,86	4,60	5,29	4,75
20.	Banda Aceh	1,62	44,41	19,01	5,64	5,67	5,91	13,71
21.	Sabang	4,72	51,13	7,46	4,17	4,89	5,08	12,91
22.	Langsa	3,91	4,60	4,10	3,93	4,20	4,70	4,24
23.	Lhokseumawe	5,45	10,80	12,08	11,53	0,78	5,93	7,76

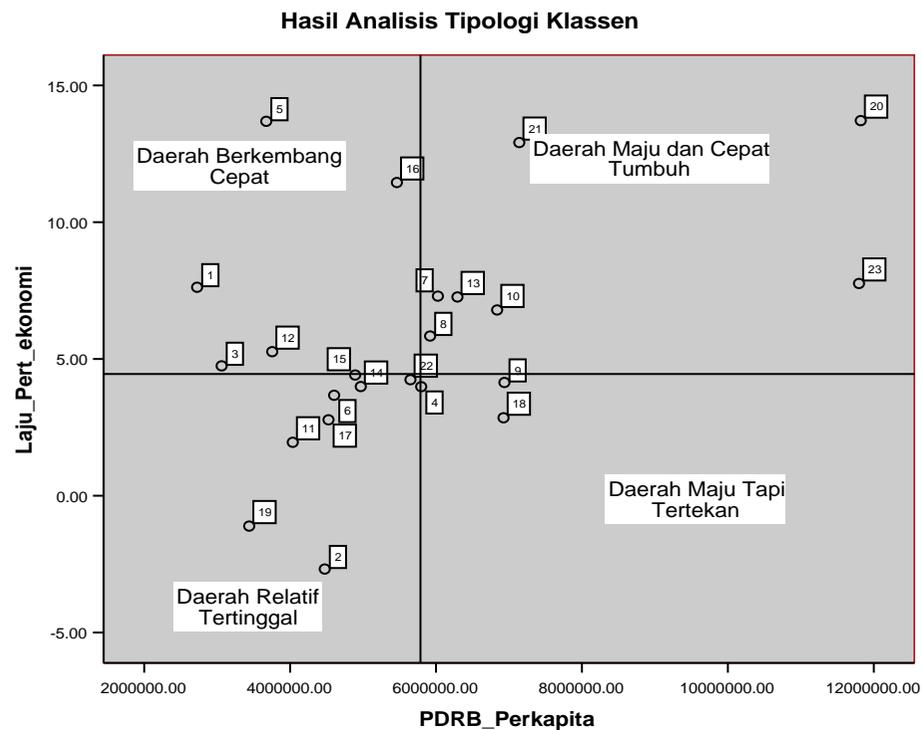
Sumber: BPS 2012

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota selama periode 2005-2010 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2005, peningkatan tertinggi terjadi di kabupaten Aceh Tengah yang mencapai 10,37 persen, sedangkan pertumbuhan paling rendah terjadi di kabupaten Aceh Jaya yaitu minus -33,96 persen. Tahun 2006 adalah Kota Sabang sebesar 51,13 persen merupakan

yang tertinggi dan Kabupaten Aceh Singkil sebesar -39,00 persen merupakan yang terendah. Pertumbuhan yang tertinggi pada Tahun 2010 adalah Kota Banda Aceh sebesar 5,91 persen dan yang terendah adalah di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 3,11 persen. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita dari tahun 2005 hingga 2010 yang tertinggi adalah Kota Banda Aceh sebesar 13,71 persen setiap tahunnya. Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata-rata hanya tumbuh sebesar -2,68 persen setiap tahunnya.

Perkembangan PDRB yang berbeda di setiap kabupaten/kota menyebabkan munculnya perbedaan pola dan struktur ekonomi. Untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi setiap kabupaten/kota dilakukan uji Klassen (Tipologi Klassen). Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth),

daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income) Laju pertumbuhan PDRB perkapita tiap Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh tahun 2005-2010 yang berbeda-beda, dapat juga dilihat pada analisis Tipologi Klassen (Gambar 1).



Gambar. 1. Hasil Analisis Klasen

Hasil uji Tipology Klassen terbesebut selanjutnya dijabarkan dalam tabel klasifikasi sebagai berikut (gambar 2).

**Gambar 2**  
**Klasifikasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Aceh (2005-2010)**

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB per Kapita (y)	
	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	<b>Daerah Maju dan Cepat Tumbuh:</b> Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Kab. Aceh Besar Kab. Bireuen Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe	<b>Daerah Berkembang Cepat:</b> Kab. Simeulue Kota Subulussalam Kab. Aceh Tenggara Kab. Pidie Jaya Kab. Gayo Lues
$r_i < r$	<b>Daerah Maju Tapi Tertekan:</b> Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Kab. Nagan Raya	<b>Daerah Relatif Tertinggal:</b> Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Timur Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Jaya Kota Langsa

hasil analisis di atas terlihat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang berbeda antar kabupaten/kota di Aceh. Beberapa kabupaten masuk ke dalam daerah berkembang, daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah cepat berkembang serta daerah relatif tertinggal.

Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kondisi ekonomi Maju dan Cepat Tumbuh sebanyak tujuh kabupaten/kota. Kondisi ketujuh kabupaten/kota tersebut menunjukkan kondisi ekonomi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi yang dilihat melalui nilai PDRB per kapita menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari rata-rata PDRB perkapita seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kondisi ekonomi semakin baik karena pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut lebih tinggi dari rata-rata.

Pada klasifikasi kedua yaitu daerah yang tergolong cepat tumbuh, terdapat lima kabupaten/kota. Kondisi pada tahapan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Aceh akan tetapi pendapatan perkapita lebih rendah dari pendapatan perkapita rata-rata kabupaten/kota.

Pada klasifikasi ketiga, terdapat tiga daerah yang tergolong maju tapi tertekan. Pendapatan perkapita di daerah ini menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi berjalan dengan baik sehingga pencapaian ekonomi yang dihitung melalui PDRB lebih baik. Akan tetapi, pertumbuhan yang rendah menyebabkan daerah ini tertekan karena pertumbuhan yang rendah akan menyebabkan daerah ini menjadi tertinggal dalam jangka panjang. PDRB yang tinggi tanpa dibarengi pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan ekonomi berjalan lambat yang pada akhirnya menurunkan kinerja ekonomi di daerah tersebut.

Klasifikasi yang terakhir pada uji Tipologi Klassen adalah daerah yang relatif tertinggal. Terdapat delapan kabupaten/kota yang masuk dalam kategori ini. Hal ini berarti kabupaten/kota tersebut memiliki pendapatan perkapita yang lebih rendah dari daerah lainnya. Selain pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari daerah lainnya juga memperburuk kondisi ekonomi kabupaten/kota tersebut.

#### 4.2. Penduduk dan Kemiskinan di Provinsi Aceh

Jumlah penduduk di Provinsi Aceh berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) sebanyak 4.494.410 jiwa, terdiri atas 2.248.952 jiwa laki-laki dan 2.245.458 jiwa perempuan. Menurut perhitungan BPS, kepadatan penduduk di Provinsi Aceh tahun 2010 mencapai 78 orang/km<sup>2</sup>. Namun, penduduk yang menyebar di dua puluh tiga kabupaten/kota berbeda kepadatannya antar daerah. Daerah terpadat adalah Kota Banda Aceh yang rata-rata per kilometer wilayahnya dihuni oleh sekitar 3.642 jiwa. Lalu Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa masing-masing 668 jiwa/km<sup>2</sup> dan 568 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya, daerah yang paling jarang penduduknya yaitu hanya 14 jiwa/km<sup>2</sup> adalah Kabupaten Gayo Lues. Menarik jika kita membandingkan angka-angka 2010 dan 2009, Banda Aceh sebagai kota terpadat di Aceh mengalami kenaikan kepadatan penduduk sebesar 5,29 persen, kota Lhokseumawe sebagai kota terbesar kedua di Aceh, meskipun kepadatan penduduknya masih tinggi, tetapi mengalami penurunan sebesar 24 persen.

Perkembangan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kab/Kota di**  
**Provinsi Aceh (dalam juta)**

No.	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Simeulue	78.389	80.380	81.127	81.790	82.344	80.674
2.	Aceh Singkil	148.277	92.605	94.961	100.265	102.505	102.509
3.	Subulussalam	-	61.870	63.444	64.256	66.451	67.446
4.	Aceh Selatan	191.539	202.080	209.853	210.111	215.315	202.251
5.	Aceh Tenggara	169.053	173.056	174.371	175.501	177.024	179.010
6.	Aceh Timur	304.643	311.413	313.333	332.915	340.728	360.475
7.	Aceh Tengah	160.549	166.895	170.766	182.533	189.298	175.527
8.	Bener Meriah	106.148	109.429	111.040	112.549	114.464	122.277
9.	Aceh Barat	150.450	151.552	152.557	153.398	158.499	173.558
10.	Aceh Besar	296.541	304.303	307.362	310.107	312.762	351.418
11.	Pidie	474.359	365.813	373.234	380.382	386.053	379.108
12.	Pidie Jaya	-	125.892	128.446	130.906	135.345	132.956
13.	Bireuen	351.835	354.027	355.989	357.564	359.032	389.288
14.	Aceh Utara	493.670	506.002	510.494	517.741	532.537	529.751
15.	Aceh Barat Daya	115.676	119.397	121.302	123.101	124.813	126.036
16.	Gayo Lues	72.045	73.752	74.312	74.794	75.165	79.560
17.	Aceh Tamiang	235.314	239.260	239.451	239.899	241.734	251.914
18.	Nagan Raya	123.743	123.984	124.141	124.340	125.425	139.663
19.	Aceh Jaya	60.660	65.996	70.673	75.597	82.904	76.782
20.	Banda Aceh	177.881	199.241	219.659	217.918	212.241	223.446
21.	Sabang	28.597	29.098	29.144	29.221	29.184	30.653
22.	Langsa	137.586	139.893	140.005	140.267	140.415	148.945
23.	Lhokseumawe	154.634	157.635	158.169	158.760	159.239	171.163

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah penduduk sebesar 529.751 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit terdapat pada Kabupaten 30.653 jiwa. Perkembangan penduduk di kabupaten/kota secara umum terus meningkat setiap tahunnya selama periode 2005-2010.

Peningkatan penduduk di beberapa kabupaten/kota di Aceh menyebabkan permasalahan baru yaitu kemiskinan. Pertumbuhan penduduk tidak mampu dibarengi dengan peningkatan ekonomi daerah sehingga jaminan hidup dengan kondisi ekonomi yang layak tidak dapat terpenuhi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pendapatan perkapita yang rendah menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota di Aceh (sesuia dengan perhitungan Tipology Klassen).

Persentase penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota di provinsi Aceh berbeda selama periode 2005-2010. Sebanyak 15 kabupetan/kota mengalami penurunan persentase hampir setiap tahunnya. menurun setiap tahunnya. Selebihnya di 9 Kab/Kota berfluktuatif (naik-turun) antara 1-2 kali. Pada tahun 2006 tren persentase

penduduk miskin naik dari tahun sebelumnya (2005) di alami oleh 4 daerah yaitu Kab. Aceh Timur, Pidie, Gayo Lues, dan Kota Banda Aceh. Pada tahun 2007 di alami oleh 2 daerah Aceh Barat Daya dan Kota Langsa. Kemudian tahun 2008, persentase naik di alami oleh 5 daerah Kab. Aceh Tamiang, Bener Meriah, Banda Aceh, Langsa, dan Lhokseumawe.

Selama periode periode 2005–2010, kenaikan persentase penduduk miskin sebanyak 2 kali dialami oleh kota Banda Aceh (2006 dan 2008) dan Kota Langsa (2007 dan 2008), hal tersebut dikarenakan adanya kecendrungan urbanisasi penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan pada saat di survey. Untuk lebih lanjut dapat diperhatikan pada tabel 6 berikut.

**Tabel 6**  
**Presentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (%)					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Simeulue	33,39	33,80	32,26	26,45	24,72	23,63
Aceh Singkil	28,61	28,41	28,54	23,27	21,06	19,39
Aceh Selatan	26,43	24,58	24,72	19,40	17,50	15,93
Aceh Tenggara	24,13	23,56	21,60	18,51	16,77	16,79
Aceh Timur	29,41	29,85	28,15	24,05	21,33	18,43
Aceh Tengah	27,11	26,68	24,41	23,36	21,43	20,1
Aceh Barat	34,78	34,54	32,63	29,96	27,09	24,43
Aceh Besar	28,81	28,66	26,69	21,52	20,09	18,8
Pidie	35,27	35,32	33,31	28,11	25,87	23,8
Bireun	29,09	29,05	27,18	23,27	21,65	19,51
Aceh Utara	35,14	34,98	33,16	27,56	25,29	23,43
ABDYA	27,71	28,30	28,63	23,42	21,33	21,33
Gayo Lues	33,28	33,51	32,31	26,57	24,22	23,91
Aceh Tamiang	24,00	23,89	22,19	22,29	19,96	17,99
Nagan Raya	35,44	35,25	33,61	28,11	26,22	24,07
Aceh Jaya	30,65	30,42	29,28	23,86	21,86	20,18
Bener Meriah	28,18	27,98	26,55	29,21	26,58	26,23
Pidie Jaya	-	-	35,00	30,26	27,97	26,08
Banda Aceh	8,20	8,25	6,61	9,56	8,64	9,19

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (%)					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sabang	29,17	28,56	27,13	25,72	23,89	21,69
Langsa	14,68	13,95	14,25	17,97	16,20	15,01
Lhokseumawe	15,57	14,25	12,75	15,87	15,08	14,07
Subulussalam	-	-	30,16	28,99	26,80	24,36

Sumber: BPS Provinsi Aceh.

Persentase penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Pidie Jaya dengan persentase mencapai 35,00 persen, 30,26 persen dan 27,97 persen dari tahun 2007 sampai 2009, yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Aceh Barat diperingkat kedua (tahun 2008 dan 2009). Sedangkan penduduk miskin terendah dipegang oleh Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa. Secara umum, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota masih berada diatas presentase Provinsi Aceh (28,69 persen di tahun 2005, 28,28 persen di tahun 2006, 26,65 persen di tahun 2007, 23,55 persen di tahun 2008 dan 21,61 persen di tahun 2009), terkecuali pada kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan yang memiliki presentase penduduk miskin lebih kecil. Sedangkan masih ada 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh yang berada di bawah

rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Aceh. Bukti ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan besar dan membutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, dalam menangani permasalahan kemiskinan penduduk, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya agar dapat berkinerja dan berdayaguna.

#### **4.3. Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh**

Salah satu cara untuk melihat keberhasilan kebijakan ekonomi kabupaten/kota yaitu dengan melihat nilai dan pertumbuhan PDRB. Nilai PDRB menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, sedangkan pertumbuhan PDRB menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah. Peningkatan PDRB tergantung oleh 3 aktor yang berperan dalam perekonomian yaitu pemerintah, swasta, dan rumahtangga. Oleh sebab itu, keberhasilan ketiga aktor ini dapat dilihat dari nilai PDRB.

Nilai PDRB setiap kabupaten/kota pasti berbeda. Perbedaan ini disebabkan perbedaan kinerja yang dilakukan

oleh ketiga aktor ekonomi. Perbedaan PDRB juga disebabkan adanya perbedaan sektor unggulan dalam pembentukan PDRB. Setiap daerah biasanya memiliki satu sektor unggulan dalam pembentuk nilai PDRB, misalnya kabupaten Aceh Timur yang memiliki sektor unggulan pertanian. Kota Banda Aceh juga memiliki sektor unggulan yaitu pariwisata. Adanya sektor unggulan setiap daerah tidak menjamin terciptanya pemerataan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sektor unggulan hanya menunjukkan kontribusi terbesar dalam membentuk nilai PDRB.

Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB akan menyebabkan nilai PDRB per kapita menurun. Hal ini berarti semakin sedikit pendapatan yang diperoleh masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga turun.

Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan pendekatan indeks williamson. Perhitungan ketimpangan ekonomi antar

kabupaten/kota di provinsi Aceh dapat diperhatikan pada Tabel 7.

**Tabel 7**

**Indeks Ketimpangan Pembangunan Daerah Aceh 2005-2010**

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>CVw</b>	0,31	0,34	0,37	0,40	0,41	0,40

**Sumber: BPS, (diolah)**

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2005-2010 terus mengalami peningkatan walaupun menurun pada tahun 2010. Nilai indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,41, kemudian menurun pada tahun 2010 yaitu 0,40. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh terus memburuk mengingat pertumbuhan nilai ketimpangan setiap tahunnya kecuali tahun 2010. Ketimpangan ini terjadi akibat adanya perbedaan yang besar antar kemampuan ekonomi kabupaten/kota yang terukur dari nilai PDRB.

Realisasi investasi yang rendah dan terkonsentrasi pada daerah tertentu menjadi salah satu penyebab munculnya ketidakseimbangan pembangunan di Provinsi Aceh. Investasi

memiliki tujuan yang sangat penting bagi perekonomian daerah. Keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya daerah dapat diatasi dengan masuknya investasi. Investasi daerah dapat berasal dari asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Perbedaan realisasi investasi antar kabupaten/kota ini menyebabkan perbedaan kondisi ekonomi yang terukur melalui PDRB. Investasi cenderung berlaku di daerah yg telah berkembang seperti Kota Banda Aceh karena adanya kepastian pasar. Pemilihan daerah yang tepat menjamin penerimaan keuntungan yang relatif lebih besar demikian pula risiko kerugian relatif lebih kecil pada umumnya.

Perbedaan kebijakan pemerintah juga menyebabkan munculnya ketimpangan pembangunan. Kebijakan pemerintah yang dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah akan sangat menentukan stimulus ekonomi. Pengeluaran yang kurang sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah tidak akan memberikan dorongan bagi produksi daerah. Sebagai contoh, daerah yang memiliki potensi pertanian harus lebih memfokuskan pengeluaran untuk sektor pertanian pertanian, khususnya untuk belanja modal dan subsidi pertanian.

Migrasi penduduk produktif yang memiliki skill/terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang menyebabkan perbedaan konsentrasi penduduk ke kabupaten tertentu. Perpindahan ini disebabkan adanya harapan memperoleh upah/gaji yang lebih besar. Migrasi juga disebabkan ketersediaan fasilitas yang tidak seimbang antar daerah. Penduduk memiliki harapan untuk hidup lebih baik. Sebagai contoh, migrasi penduduk ke Kota Banda Aceh menyebabkan ketersediaan sumber daya manusia di Kota Banda Aceh. Ketersediaan SDM ini menyebabkan Kota Banda Aceh lebih mampu mengelola sumber daya yang ada untuk menjalankan perekonomian. Kondisi ini menyebabkan produksi ekonomi Kota Banda Aceh tinggi dan cenderung meningkat tajam. Kondisi inilah yang membuat Kota Banda Aceh masuk dalam kategori maju dan cepat tumbuh dalam pengujian Klassen.

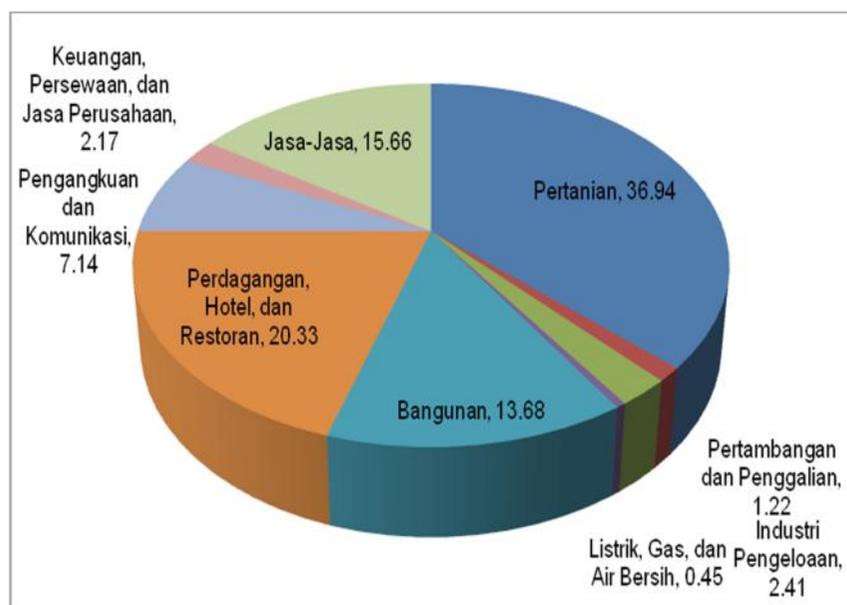
#### **4.4. Upaya Mengurangi Ketimpangan Pembangunan**

Kondisi ketimpangan pembangunan yang dihadapi kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki potensi permasalahan yang cukup besar khususnya dalam jangka panjang. Ketimpangan yang terus terjadi dan semakin besar akan menimbulkan kecemburuan antar daerah. Permasalahan ini yang dikhawatirkan menjadi pemicu keinginan adanya pemekaran provinsi. Dalam jangka panjang, permasalahan migrasi penduduk ke wilayah yang maju akan menyebabkan munculnya daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi sehingga dikhawatirkan muncul permasalahan-permasalahan sosial. Oleh sebab itu, perlu adanya strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Aceh, melalui perbaikan kebijakan ekonomi dan kependudukan.

Upaya peningkatan nilai PDRB daerah dapat dilakukan dengan fokus pengembangan spesialisasi daerah terhadap potensi yang dimiliki. Daerah-daerah dengan peta sebaran pembentuk PDRB daerahnya, untuk lebih fokus mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar bagi daerahnya.

Sebagai contoh misalnya yang masuk dalam kategori tertinggal harus mampu mengejar ketertinggalan PDRB dengan kabupaten/kota yang maju adalah Kabupaten Aceh Singkil yang masuk dalam kategori kabupaten tertinggal. Ketertinggalan pembangunan perekonomian di Aceh Singkil, dapat diperhatikan dari aspek pembentuk PDRB terhadap daerah Aceh Singkil. Seperti pada Gambar 3 dibawah ini:

**Gambar 3.**  
**Pembentuk PDRB Aceh Singkil 2010**



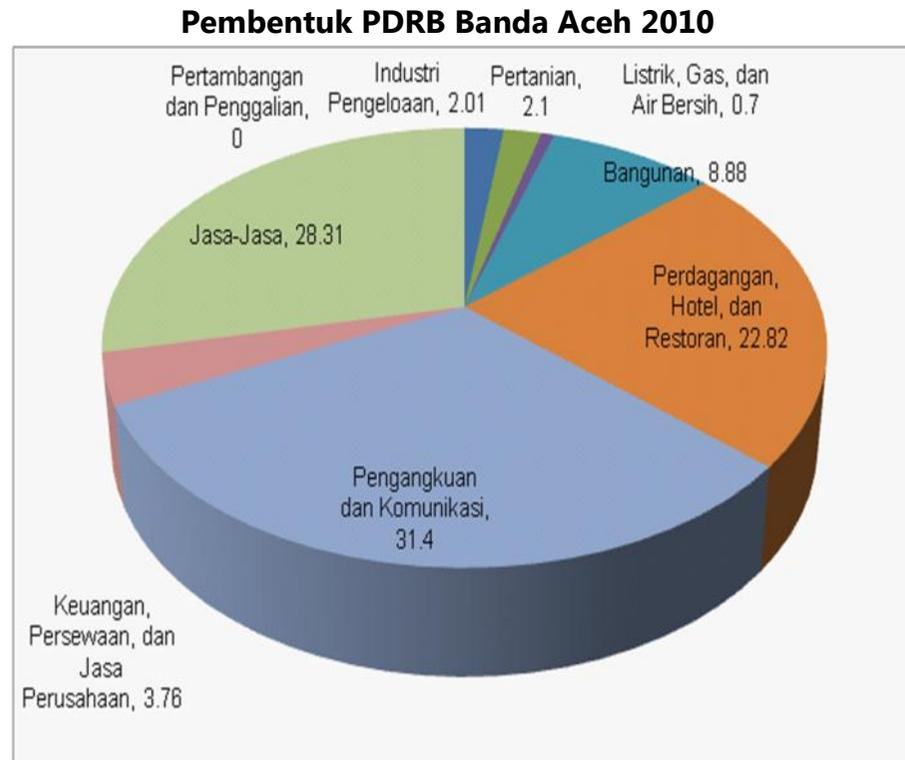
Dilihat dari gambar diatas, ditemukan bahwa perekonomian Aceh Singkil ditopang oleh dua sektor besar yaitu sektor pertanian (36,94 persen) dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (20,33 persen). Untuk meningkatkan nilai PDRB maka pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus lebih memaksimalkan sektor ini. Kebijakan yang diambil harus mampu mendorong peningkatan nilai kedua sektor unggulan ini. Pada sektor pertanian misalnya pemerintah harus mendukung upaya pengembangan sektor ini melalui upaya membuka lahan baru bagi petani, memberi kemudahan investasi untuk sektor pertanian, dan pemberian subsidi sektor pertanian.

Sedangkan untuk-untuk sektor yang tidak unggul dan belum dapat dimaksimalkan di Aceh Singkil adalah indsutri pengelelolaan karena hanya berkontribusi sebesar 1,22 persen pada tahun 2010. Hal ini dapat dijadikan agenda perbaikan ekonomi untuk jangka panjang.

Kemudian untuk kota Banda Aceh, jika dilihat dari kontribusi pembentuk PDRB. Maka fokus pengembangan perekonomian lebih dititik beratkan kepada pada 3 leading sektor yaitu pengangkutan, perdagangan, persewaan jasa

keuangan. Kontribusi pembentuk PDRB kota Banda Aceh 2010 dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini:

Gambar 4.

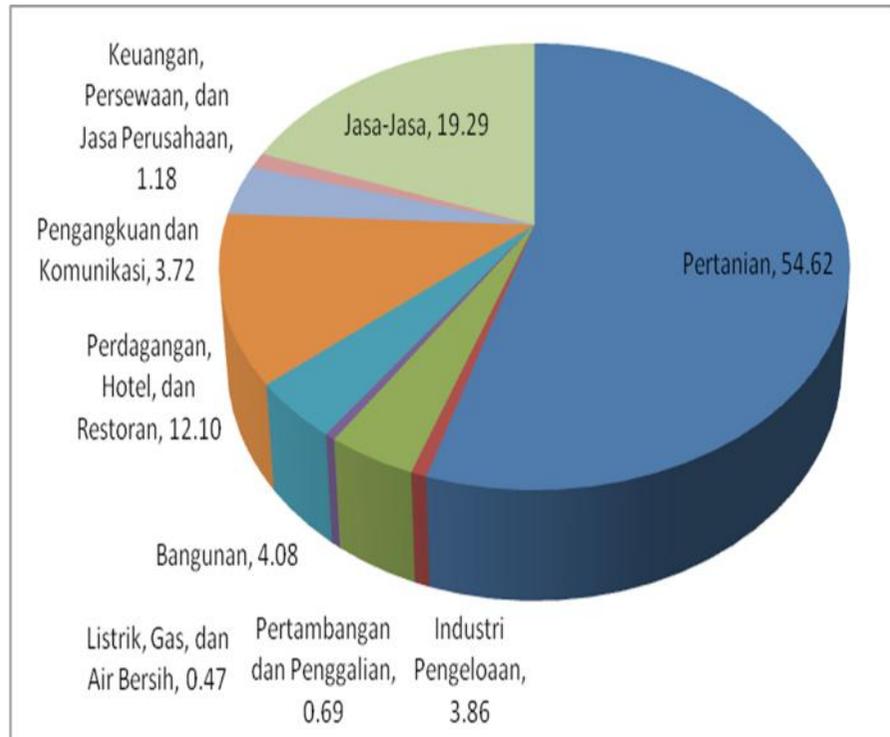


Hasil perbandingan di atas dapat diketahui bahwa Kota Banda Aceh memiliki sektor unggulan pembentuk PDRB yaitu sektor pengangkutan/komunikasi dan sektor jasa-jasa.

Sebesar 54,22 persen perekonomian Kota Banda Aceh di topang oleh kedua sektor tersebut. Sektor pertanian tidak berkontribusi besar terhadap PDRB karena hanya menopang 2,1 persen. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh terus memfokuskan kebijakan dan pengeluaran pemerintah pada sektor unggulan tersebut. Pemerintah jangan sampai terfokus pada sektor yang tidak menunjukkan kontribusi yang besar.

Selanjut untuk katagori daerah hasil pemekaran yang sedang mengalami pertumbuhan seperti Pidie Jaya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pertanian dalam upaya pertumbuhan ekonomi telah berhasil dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya. Optimalisasi potensi daerah ke sektor pertanian mampu memberikan kontribusi ke PDRB terbesar. Bahkan kontribusinya melebihi setengah dari total pembentuk PDRB Pidie Jaya. Lebih lanjut kontribusi sektor pembentuk PDRB di Pidie Jaya dapat diperhatikan pada gambar 5 berikut ini :

Gambar 5.  
Pembentuk PDRB Pidie Jaya 2010



Pertanian di Kabupaten Pidie Jaya berkontribusi 54,62 persen terhadap PDRB. Kontribusi yang cukup besar mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Pidie Jaya. Model pengembangan ekonomi Pidie Jaya dapat diterapkan di daerah-daerah yang memiliki karakteristik yang sama khususnya potensi pertanian. Penerapan kebijakan pembangunan ini diharapkan mampu menciptakan

perekonomian yang produktif di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kebijakan ini pada akhirnya diharapkan akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar kabupate/kota di Provinsi Aceh.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang diukur melalui nilai PDRB selama periode 2005-2010 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita dari tahun 2005 hingga 2010 yang tertinggi adalah Kota Banda Aceh sebesar 13,71 persen setiap tahunnya. Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata-rata hanya tumbuh sebesar -2,68 persen setiap tahunnya.

Hasil uji Klassen menyimpulkan bahwa dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sebanyak 7 kabupaten/kota masuk dalam kategori Daerah Maju dan Cepat Tumbuh. Sebesar 5 kabupaten/kota masuk dalam kategori daerah berkembang cepat dan 3 kabupaten masuk dalam kategori Daerah Maju Tapi Tertekan. Jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori tertinggal sebanyak 8 daerah.

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2005-2010 terus mengalami peningkatan walaupun menurun pada tahun 2010. Nilai indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,41 walaupun berhasil turun sedikit menjadi 0,40 di tahun 2010. Hal ini membuktikan semakin memburuk mengingat adanya pertumbuhan nilai ketimpangan setiap tahunnya kecuali tahun 2010.

Ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh disebabkan oleh beberapa kondisi. Realisasi investasi yang rendah dan terkonsentrasi pada daerah tertentu menjadi salah satu penyebab munculnya ketidakseimbangan pembangunan di Provinsi Aceh. Kebijakan pemerintah yang kurang memfokuskan ke sektor unggulan daerah juga menjadi penyebab semakin tidak seimbang pembangunan di Aceh. Migrasi penduduk produktif yang memiliki skill/terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang menyebabkan perbedaan konsentrasi penduduk ke kabupaten tertentu.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan setelah melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan melakukan pemetaan yang tepat terhadap keunggulan daerah masing-masing. Selanjutnya dilakukan konsentrasi kebijakan dan pengeluaran daerah untuk sektor unggulan yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan PDRB daerah tersebut.
2. Pemerintah diharapkan menetapkan dan mengembangkan kerjasama dan integrasi program pembangunan antar daerah yang mempunyai fungsi kawasan yang sama, terutama kegiatan ekonomi. Penguatan/pengembangan forum kerjasama antar daerah kab/kota untuk merumuskan arah pembangunan yang saling terintegrasi antar daerah.
3. Pemerintah diharapkan segera membangun industri pengolahan dibidang agrobisnis yang saling menunjang satu sama lain sesuai dengan tipologi dan potensi daerah.
4. Peningkatan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dana pembangunan melalui; peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat.
5. Untuk meningkatkan Stimulus pembangunan daerah Kab/Kota, perlu dipertimbangkan Revisi Qanun (Perda) tentang Pengelolaan dana Otsus. Terkait formulasi besaran persentase pembagian dana otsus ke kab/kota dan mekanisme transfer, serta kewenangan pengelolaannya di kab/kota
6. Masih adanya kabupaten yang termasuk dalam empat klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum merata antar kabupaten/kota di Aceh. Oleh karena itu adanya penanganan yang lebih serius dari Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari daerah yang relatif tertinggal agar bisa sejajar dengan pertumbuhan kabupaten lain yang lebih maju baik dari pertumbuhan maupun pembangunan perkapita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- BPS Provinsi Aceh 2005-2010. *Buku Aceh Dalam Angka Tahun 2005-2010*.
- \_\_\_\_\_, *Produk Domestik Regional Bruto Kab dan Kota 2005-2010*
- Bank Dunia, 2006, *Analisis Pengeluaran Publik Aceh- Pengeluaran Untuk Rekontruksi Dan Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Kajian Kemiskinan Di Aceh Tahun 2008; Dampak Konflik, tsunami, dan Rekonstruksi Terhadap Kemiskinan Di Aceh*.
- Jhingan. ML. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara; Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV, 2005, *Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Wilayah Kalimantan*. Samarinda
- UNDP, 2010, *Laporan Pembangunan Manusia Aceh Tahun 2010*

- Thee Kian Wie, 1982, *Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Todaro, M.P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I, Edisi Kedelapan. Erlangga, Jakarta.
- Rahmaddin MY, 2009. *Indikator Pembangunan Daerah*. [http://ovalhanif.wordpress.com/2009/04/21/indikator-pembangunan daerah/](http://ovalhanif.wordpress.com/2009/04/21/indikator-pembangunan-daerah/). Akses pada tanggal 24 Januari 2012.
- <http://www.indonesia.go.id/in/pemerintahdaerah/provinsina-nggroeacehdarussalam/sumber-daya-alam.html>.
- [Pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/pengelolaandana-otsus/](http://Pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/pengelolaandana-otsus/)